

# POLA KOMUNIKASI TOKOH LINTAS AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERBEDA AGAMA DI KOTA BANDUNG

Oleh:

Diah Fatma Sjoraida<sup>1</sup>, Dede Mariana<sup>2</sup>, Awing Asmawi<sup>3</sup>  
[diah.fatma@unpad.ac.id](mailto:diah.fatma@unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [dedemariana@yahoo.com](mailto:dedemariana@yahoo.com)<sup>2</sup>, [awingasmawi@ymail.com](mailto:awingasmawi@ymail.com)<sup>3</sup>,

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyak munculnya kekerasan berlabelkan agama di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi ancaman bagi integrasi sosial berbangsa dan bernegara. Berbagai pihak melakukan upaya-upaya menjaga kerukunan umat beragama, agar tidak terjadi konflik atas nama agama. Pemerintah misalkan, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri; Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung yang bertujuan mengatur komunikasi dan interaksi antar berbagai umat beragama bisa berjalan dengan damai dan harmonis. Namun kenyataannya, aturan, ajaran dan tindakan politik seperti belum mampu menyentuh akar permasalahan terjadinya kekerasan atas nama agama dalam masyarakat, sehingga kekerasan terus saja terjadi. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bandung. Penelitian ini ingin mengidentifikasi pola komunikasi tokoh lintas agama dalam menjaga kerukunan umat berbeda agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pola komunikasi tokoh lintas agama kota Bandung dilakukan dengan cara komunikasi dua tahap, yakni: 1) komunikasi formal, mereka menyampaikan pendapat, usulan serta gagasannya melalui musyawarah yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah keputusan. Musyawarah dilakukan secara rutin antar tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB kota Bandung sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. 2) Komunikasi informal, mereka melakukan kunjungan silaturahmi, mengadakan diskusi terbuka, menyelenggarakan perlombaan dan lainnya.

Kata Kunci : Kerukunan Umat Beragam, Pola Komunikasi, Tokoh Lintas Agama.

---

## PENDAHULUAN

Kehidupan umat beragama di Indonesia kembali diuji dengan munculnya gejala-gejala dan kejadian-kejadian kekerasan atas nama agama. Beberapa waktu yang lalu, kita tentu masih ingat bagaimana kasus bentrokan dan kekerasan atas nama agama terjadi di Cikeusik Pandeglang Banten, antara penganut Ahmadiyah dengan umat Islam (Islam *mainstream*). Begitupun dengan bentrokan dan kekerasan yang terjadi antara penganut Protestan dan umat Islam di Temanggung Jawa Tengah dan kasus serupa di Medan merupakan rentetan kasus-kasus kekerasan atas nama agama yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selain itu, kasus pengusiran yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur yang dilakukan oleh warga Madura terhadap pengikut Islam Syi'ah. Kasus-kasus serupa juga pernah terjadi di daerah-daerah, seperti Maluku, Bekasi, Tasikmalaya dan Kuningan yang merupakan ancaman bagi disintegrasi sosial bangsa Indonesia.

Berbagai pihak melakukan upaya-upaya penyelesaian agar konflik atas nama agama bisa dihindari dan ditinggalkan. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri; yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung mengeluarkan

peraturan bagaimana sebaiknya komunikasi dan interaksi antar umat beragama bisa berjalan dengan damai dan harmonis, tanpa mengekang aktualisasi nilai-nilai agama umat masing-masing. Konstitusi negara UUD 1945 bahkan telah mengamanatkan jaminan bagi setiap penganut agama dan keyakinan sebagai hak asasi setiap umat manusia. Aturan tentang etika kehidupan umat beragama juga dilakukan pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) seperti dilakukan di Cianjur (*perda syari'at*), Tasikmalaya (*religius Islami*) dan Bandung (*Bandung Agamis*). Lebih mendasar lagi, etika hubungan umat beragama secara teologis juga memiliki akar mendasar pada ajaran agama masing-masing yang melarang melakukan tindakan kekerasan.

Aripudin A, menulis di Republik (26/11/2010) dengan judul "*Akar Kekerasan*". Menurutnya, kenyataan yang ada terkait dengan aturan, ajaran dan tindakan politik seperti belum mampu menyentuh akar permasalahan terjadinya kekerasan atas nama agama dalam masyarakat. Akibatnya, kekerasan terus saja terjadi, bahkan munculnya perda-perda seperti disebut di atas, cenderung "mengayomi" umat beragama tertentu, yaitu Islam. Imbauan, pembinaan, pemberian sanksi dan tindakan hukum seperti tidak mampu menghentikan terjadinya kekerasan. Ahli psikoanalisis seperti Sigmund Freud, pernah mengatakan bahwa kekerasan merupakan potensi yang ada pada manusia, sehingga kekerasan merupakan "bawaan normal" dan natural manusia. Hanya saja, pernyataan Freud tersebut dibantah oleh Konrad Lorenz, yang mengatakan bahwa kekerasan dan pertikaian antar manusia, termasuk kekerasan atas nama agama, terjadi karena proses interaksi manusia antara satu dengan lainnya. Terjadinya kekerasan tersebut, bukan sebatas potensi dalam diri seorang manusia, namun juga karena faktor-faktor interaksi sosial-budaya dimana manusia hidup.

Mengacu pada tesis Lorenz tersebut, persoalan kekerasan atas nama agama yang akhir-akhir ini terjadi nampaknya optimis bisa dihindari dan diminimalisasi karena berakar pada persoalan sosial kemanusiaan, seperti persaingan dan eksklusivitas dalam penyebaran keyakinan, keadilan dan diskriminasi, bukan pada persoalan etis-teologis ajaran suatu agama. Persoalan diskriminasi dalam kebebasan menyebarkan keyakinan kepada orang lain, apalagi jika orang lain tersebut sudah beragama misalnya, merupakan persoalan umum pada suatu daerah dan atau negara yang dihuni mayoritas umat beragama tertentu. Solusi yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga non formal lainnya seperti ormas keagamaan dan NGO (*Non Government Organization*), penyelesaian kekerasan atas nama agama sudah cukup diupayakan. Tetapi, penyelesaian tersebut nampak belum optimal karena upaya penyelesaiannya tidak berpijak pada persoalan nyata yang ada di lingkungan tempat interaksi umat berbeda agama.

Padahal pluralitas agama di Indonesia merupakan realitas sosial sejak dari awal berdirinya negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para pendiri bangsa sangat memahami kenyataan sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multikultur dan di dalamnya ada beberapa kelompok umat dengan agama yang berbeda (plural). Ada kelompok-kelompok minoritas yang hidup bersama kelompok mayoritas yang eksistensinya harus dihormati, diakui dan dipertahankan sebagaimana dicanangkan dalam semboyan bhineka tunggal ika (Latif, 2011: 369).

Pluralitas atau kemajemukan kelompok umat beragama itu menurut Furnival (dalam Latif, 2011: 369) menjadi beban tugas yang teramat berat bagi semua unsur bangsa untuk membangun integrasi. Kemajemukan ini menurut Hayat (2012:25) berimplikasi pada dua potensi yang kontradiktif sekaligus, yaitu potensi integrasi dan disintegrasi. Potensi disintegrasi ini perlu dikelola agar berubah menjadi potensi integrasi yang positif yang mampu mendukung pembangunan di atas kemajemukan.

Di sini peran aktor yang bisa menyaring informasi dari para aktor dengan latar belakang agama yang berbeda sangat penting. Jaringan sosial (*opinion leader, gate keepers, cosmopolites, bridge, liaison, dan isolate* (Muhammad, 2009:103) akan berfungsi dengan

baik dan terjaganya hubungan dengan baik jika ada aktor yang berfungsi sebagai penyaring informasi dalam komunikasi organisasi yang disebut gate keeper. Individu yang berperan sebagai gate keeper akan mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. Posisi gate keeper bukanlah aktor pemimpin dalam struktur organisasi, tetapi dia memiliki hubungan dengan berbagai aktor lain dalam jaringan karena bisa diterima berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang saling berseberangan. (Muhammad, 2009: 102).

Kajian teori dan konsep di atas mengerucut pada fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini. Hubungan dalam sebuah jaringan antar tokoh lintas agama idealnya dilandasi dalam prinsip kesetaraan (*equality*) akan meningkatkan daya kohesi dalam jaringan tersebut. Ketika kepentingan dan kemampuan telah dipolakan secara paksa oleh struktur yang dibuat dengan kebijakan top down, maka aktor hanya akan mengejar kepentingan itu sampai pada batas kemampuannya di bawah aturan/norma dalam struktur sosial yang sifatnya memaksa itu. Sehingga peran gate keeper sangat penting untuk bisa meretas hambatan komunikasi antartokoh lintas agama dan mereduksi potensi konflik karena kekeliruan memahami nilai dan norma dari agama lain. Sangat diperlukan kreativitas seorang aktor dalam membuat terobosan hingga muncul nilai-nilai kebersamaan.

Dari latar belakang di atas, ada dua sorotan utama yang jadi dasar penelitian ini, yakni: bagaimana tokoh lintas agama di kota Bandung dalam menjaga kerukunan umat berbeda agama? bagaimana wujud integrasi kehidupan umat berbeda agama di Kota Bandung?

Keragaman etnis, suku, budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia merupakan kenyataan (relitas) dan fakta yang sulit dibantah. Antropolog Koentjaraningrat (1984) mencatat bahwa di Indonesia terdapat hampir 300-an lebih etnis sukubangsa dan bahasa. Koentjaraningrat menulis tentang keragaman tersebut dan jumlah etnis, suku bangsa dan bahasa di Indonesia di tahun 1984. Berkaitan dengan itu, Badan Pusat Statistik dalam laman websitenya ([bps.go.id](http://bps.go.id)) menyebutkan bahwa pertama kali data suku dihasilkan di Indonesia melalui data Sensus Penduduk (SP) tahun 1930 oleh Pemerintah Belanda. Tetapi data tersebut baru diupdate tujuh puluh tahun kemudian, yaitu di era reformasi. Data suku dikumpulkan kembali oleh BPS melalui SP2000 dan dilanjutkan kembali pada SP2010. Berdasarkan SP2010 ditemukan 1331 kategori suku, yang kemudian pada tahun 2013 lalu BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) melakukan tahap identifikasi dan klasifikasi yang menghasilkan 633 kelompok suku besar.

Di samping itu, berkaitan dengan keberagaman agama, menurut Subagja (1981), terdapat agama asli pada tiap-tiap etnis ataupun suku tersebut. Ditambah lagi menurut Suryadinata dkk (2003:101-103) terdapat beberapa agama besar yang diakui oleh pemerintah Indonesia, seperti Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Mereka hidup terpecah dalam setiap daerah dan pulau di Indonesia. Mereka bersatu seperti nampak dalam moto Bhineka Tunggal Ika dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.

Setiap penganut agama dan kepercayaan tumbuh dan berkembang dijamin oleh konstitusi negara, yaitu UUD 1945 dan keputusan-keputusan pemerintah dalam menjaga potensi insani tersebut. Namun dalam perjalanannya, potensi dan kerukunan antar umat berbeda agama itu, tidak selamanya terjadi dengan damai dan harmonis. Harmonisme kehidupan antar suku dan agama mulai terusik dengan banyaknya konflik, baik di daerah maupun di perkotaan. Konflik antarsuku di Papua, konflik antar suku dan agama di Maluku, konflik antar etnis di Tasikmalaya dan konflik-konflik serupa yang terjadi akhir-akhir ini, merupakan bukti telah terjadinya perubahan dalam masyarakat menyangkut tatanan kehidupan mereka.

Secara teologis, Afif Muhaammad dalam Makalah Orasi Ilmiahnya di IAIN Sunan Gunung Djati atau Universitas Islam Negeri sekarang (1998), dengan judul *Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Menurut Muhammad persoalan konflik agama, memiliki

dimensi ganda; (1) agama sebagai pemersatu, dan; (2) agama sebagai sumber konflik. Sebelumnya, dikatakan Elizabeth K. Nottingham (1996: 31-35), bahwa agama memiliki dua fungsi; fungsi *laten* dan *manifest*. Sebagai fungsi laten, agama merupakan rangkaian doktrin dan keyakinan setiap pemeluknya, sehingga relatif memiliki kesamaan. Hanya saja, aplikasi keyakinan tersebut dalam kehidupan nyata sering berlainan, jika tidak mau dikatakan, sering berbeda sesuai dengan motif-motif yang melandasi tindakan umat beragama. Max Weber (1992) dalam Etika Protestannya bahkan membuktikan bahwa agama dapat menjadi spirit bagi tumbuhnya kapitalisme di Eropa.

Agama pada dimensi tertentu merupakan sumber kedamaian dan ketentraman umat manusia. Disisi lain merupakan sumber bencana dan peperangan. Agama menjadi sumber kedamaian manakala ajaran-ajarannya dihayati sebagai medium terjadinya “kesatuan wujud” dengan yang Maha Tinggi atau “wujud suprim” (*supreme being*). Dalam hal ini, umat penganut agama mengalami penyatuan internal, sehingga terhindar dari perbedaan-perbedaan pada tataran praksis empiris. Namun, umat beragama juga melakukan interaksi dan komunikasi dengan umat-umat lainnya, dan wujud suprim tersebut semestinya menjadi miniatur dan banyangan hubungan dengan sesama manusia (Pettazzoni, 2000:163).

Apa yang terjadi sekarang adalah tidak adanya hubungan paralel antara hubungan umat beragama dengan Tuhannya (*hablum minallah*) dengan hubungan serupa dengan sesama manusia dan atau umat beragama (*hablum minannas*). Begitu semaraknya upacara ritual keagamaan dilakukan umat manusia, namun semarak tersebut tidak nampak dalam semarak meninggalkan kemungkaran, korupsi, pelanggaran HAM dan praktik ketidakadilan. Terjadinya petikaian dan konflik agama yang marak terjadi akhir-akhir ini, saya kira merupakan bukti tidak paralelnya hubungan umat beragama dengan sesamanya. Bahkan dalam bentuk tertentu, konflik tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma agama sendiri.

Berdasar pada asumsi tersebut, nampaknya setiap persoalan berbau agama dapat dikembalikan atau diselesaikan dengan kembali pada ajaran agama masing-masing penganut agama. Tetapi, fungsi manifest agama selalu saja berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan kultural masyarakat, termasuk ideologi, politik dan cara-cara komunikasi yang dibangun umat beragama. Pada aspek-aspek tersebut, konflik antar agama sering terjadi. J. Leatherman (2004:103) mengemukakan tiga penyebab konflik; konflik struktural, identitas dan konflik kelembagaan. Pada kasus-kasus konflik antar umat beragama dan umat berbeda agama di Indonesia tidak luput dari penyebab di atas.

Pada kasus konflik agama di Maluku misalnya, politik pemerintah relatif cukup berhasil dalam meredam meluasnya konflik umat berbeda agama. Namun usaha tersebut dapat lebih tajam diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan budaya. Mengacu pada temuan Samuel Waileruny (2010: 8-9), klan Pela dan Gandong sebagai bagian Anak Negeri Maluku memiliki perekat yang kuat dalam membangun persaudaraan. Mereka ketika konflik terjadi tidak saling menyerang, namun mereka menyerang Anak Negeri Maluku yang berbeda agama. Nilai-nilai budaya strategis tersebut kemudian dikembangkan hingga mencakup hubungan lintas agama.

Konflik secara umum, termasuk konflik antar umat beragama, ternyata tidak semata-mata memiliki dampak negatif, namun juga positif. Ritzer dan Goodman (2005: 155) misalnya, berpendapat bahwa konflik dapat membantu mempererat ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi, atau konflik dengan masyarakat lain, dapat memperbaiki kepaduan integrasi. Konflik dapat membantu pembentukan dan peningkatan solidaritas *in-group*. Jadi, konflik memiliki nilai ganda; positif dan negatif. Sebab konflik itu sendiri secara definitif merupakan instrumen terjadinya kompetisi antara seseorang atau kelompok satu dengan lainnya. Sehingga sangat penting untuk melakukan proses manajemen konflik dengan baik untuk memunculkan efek positif.

Menanggapi konflik antara etnis Kroasia dan kelompok muslim di Kota Mostar misalnya, K. Brown (2004: 111), mengungkapkan bahwa pecahnya konflik telah menghasilkan perubahan struktural dalam masyarakat. Kekacauan, polarisasi dan konfrontasi antar kelompok mengakibatkan sikap negatif yang diperkuat keyakinan dan anggapan abstrak menjadi nyata. Hasil akhir biasanya ekonomi perang (*economic war*). Pemimpin yang bertahan memiliki kepentingan ekonomi tertentu dalam kekacauan, ia tidak butuh damai. Ia menjadi pemilik saham dalam kekacauan yang berulang-ulang, bukan dalam transformasi konflik. Berarti, mereka memiliki semangat untuk mencegah resolusi konflik dan memulai konflik baru.

Pada proses penyelesaian konflik pendapat Liliweri (2005: 208), boleh jadi bisa menjadi langkah solutif. Liliweri mengusulkan beberapa usaha penyelesaian konflik secara umum, berikut; (1) pencegahan konflik; (2) penyelesaian konflik; (3) pengelolaan konflik; (4) resolusi konflik; (5) transformasi konflik dan; (6) manajemen konflik yang merupakan tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakan dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Lepas dari pendapat-pendapat tersebut, konflik memiliki akibat positif dan negatif. Akibat positif; pertama, konflik membantu meningkatkan solidaritas *in-group*, membantu fungsi komunikasi, memperjelas posisi, mendamaikan kelompok yang saling bersaing, memunculkan isu-isu harapan yang terpendam, memperjelas batas-batas norma kelompok, mengurangi ketidakpastian dan merangsang untuk menemukan nilai-nilai baru (Waileruny, 2010:36).

Akibat negatif konflik akan nampak kerugian yang timbul karena pertengkaran dalam bentuk kerugian fisik dan non fisik. Baik akibat positif maupun negatif, konflik merangsang timbulnya perubahan sosial maupun kultural. Karena akibat negatif konflik itulah, setiap orang atau kelompok orang, mencari jalan keluar agar tetap hidup dalam kedamaian dan tentram. Penchrin tersebut berkaitan dengan aspek-aspek sosial, budaya dan kenegaraan. Sistem negara menurut Johan Galtung (2003: 21), dapat membawa kedamaian. Begitu pula dengan komponen-komponen lainnya, yang dapat mempertalikan setiap warga (*civic engagement*) yang lintas SARA.

Kondisi negara yang aman dan damai menurut Tony D. Pariela (2008: 225), masih mungkin terpelihara dengan catatan masyarakat memiliki derajat *bonding social capital* yang rendah yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlalu terikat pada batas-batas primordialisme, sehingga kontak dan komunikasi lintas SARA yang berlangsung di berbagai wilayah publik (*public sphere*) akan membentuk wilayah *bonding social capital* yang baru sebagai suatu bangsa yang konstruktif dalam kondisi aman dan damai. Kondisi demikian pula yang diharapkan masyarakat Indonesia sebagai negeri berlimpah modal-modal sosial dan kultural yang belum mendapatkan perhatian penuh dijadikan sebagai titik pijakan dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, politik dan budaya, termasuk konflik antar umat berbeda agama.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang menurut Max Travers (2001: 9-10) dan Lawrence W Neuman (1996:62), keduanya tidak jauh berbeda menyatakan bahwa pendekatan kualitatif fokus telaaahnya pada makna-makna subyektif, pengertian-pengertian, metafor-metafor, simbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi ihwal suatu kasus spesifik yang hendak diteliti. Pendekatan ini dipilih agar studi ini memperoleh gambaran detail dan mendalam informasi mengenai suatu gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan rincian-rincian spesifik dari situasi, setting atau relasi-relasi sosial yang berlangsung dalam lingkup subyek penelitian.

Peneliti menempatkan diri sebagai *the insider* yang berusaha sejauh mungkin melakukan empati (atau memproyeksikan diri dalam peran dan persepsi objek yang diteliti) agar bisa sebaik mungkin merefleksikan penghayatan subjektif objek yang diteliti.

Berdasarkan azas penelitian kualitatif, analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai, diperlukan aktifitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Menurut Sutopo dalam Noeng Muhadjir (2000:5), proses analisis data tersebut dinamakan *Model Analisis Interaktif*. Berdiri pada prinsip bahwa kebenaran ilmiah dibangun dari sejumlah banyak kenyataan dan fakta, maka metode penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah metode studi kasus. Hal ini disebabkan oleh objek yang akan diteliti menyangkut fakta-fakta sosial empirik.

Menurut S. Nasution (2005: 27), *case study* atau metode studi kasus ialah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Case study dapat dilakukan terhadap individu, segolongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial. Metode ini dipandang efektif karena mampu digunakan untuk mencari motif-motif dibalik fakta sosial yang tampak secara empirik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih bertumpu pada pendekatan psikologi sosial sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang telah matang.

Melalui metode studi kasus, pemaparan yang akan dikemukakan dalam hasil penelitian tidak lain merupakan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian dilakukan dan pemaparan hasil penelitian akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang ada.

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, untuk data yang bersifat pokok (primer) digunakan teknik angket. Sementara itu, data yang bersifat sekunder dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Keseluruhan teknik itu sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam teknik ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung untuk mengadakan eksplorasi dan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik ini dipandang efektif karena dengan melakukan teknik ini peneliti akan mendapatkan data dan keterangan yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan sebagai upaya perolehan data dan keterangan tertulis dari beberapa pihak yang dianggap representatif untuk kepentingan dan tujuan penelitian (Moleong, 1988: 135).

c. Studi Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara yang dilakukan. Studi dokumentasi ini juga dilakukan dengan menggambarkan mekanisme manajemen konflik yang dipraktikkan oleh para pemuka lintas-agama dan bukti-bukti dokumentasi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan social yang terjadi dari dahulu hingga sekarang sering kali diikuti oleh berbagai hal yang dilatar belakangi agama. Sangat sulit dihindari munculnya sentimen yang dilatarbelakangi agama, kepercayaan, keyakinan suatu aliran dan kefanatikan golongan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di berbagai tempat dan setiap waktu sering terjadi

kecenderungan sebagian masyarakat untuk tidak cocok antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Gejala tersebut merupakan dampak dari perubahan sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Perubahan social tersebut terlihat dari berbagai segi, antara lain dari segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan.

Senada dengan hal itu, Pitirin Sorokin (1889-1968), seorang ahli sosiologi berkebangsaan Rusia juga berpandangan bahwa peradaban besar selalu berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Tiga siklus kebudayaan tersebut, meliputi *Pertama*, kebudayaan ideasional ( ideational cultural) yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati ( super natural ). *Kedua*, kebudayaan idealistis (idealistic culture) di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal, dan *Ketiga*, kebudayaan sensasi ( sensate culture) di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.

Kebudayaan merupakan salah satu paham yang paling menyeluruh dan universal dalam ilmu-ilmu sosial. Secara bahasa kebudayaan (*culture*) bermakna adab, ilmu, pengetahuan. Sedangkan secara istilah kebudayaan adalah ilmu dan adab, tradisi dan kebiasaan, hal-hal yang diterima di setiap masyarakat dan bangsa, baik itu ilmu, kebiasaan, adab dan tradisi yang diterima dan diamalkan oleh masing-masing anggota komunitas masyarakat tersebut. Dengan kata lain, kebudayaan adalah sekumpulan ilmu, pengetahuan, seni, pemikiran dan keyakinan, moral, aturan, adab dan kebiasaan. Serupa dengan Geerts dalam Tasmuji dkk (2001: 154), Geertz dalam bukunya *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya. Budaya juga menurutnya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Kebudayaan terbentuk sebagai wujud dari proses komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan yang terjadi di antara berbagai lapisan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa komunikasi merupakan proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi. Pola komunikasi merupakan suatu system penyampaian pesan, ide atau gagasan dengan cara-cara tertentu, dengan tujuan tertentu dan bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu atau kelompok lain. Menurut Effendy (1989) pola komunikasi merupakan proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis.

Salah satu tantangan besar dalam menentukan pola komunikasi adalah proses yang berhubungan dengan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat membantu menentukan iklim dan moral komunikasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada jaringan komunikasi. Farace (Berberg dan Chaffee, 1987) melihat jaringan komunikasi sebagai suatu pola yang teratur dari kontak antara person yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya.

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pola komunikasi yang terbangun antar tokoh beragama di Kota Bandung bisa dikategorikan baik. Temuan ini peneliti peroleh setelah melakukan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi ke tempat/objek penelitian.

Menurut informan yang peneliti temui, yaitu ketua FKUB Kota Bandung, Ahmad Suherman, Ahmad menuturkan bahwa jaringan komunikasi di antara tokoh lintas agama terjaga dengan baik. Kerukunan sangat kondusif, tahun kemarin ada penelitian dari Pasca

Unpad, kerukunan umat beragama di Bandung itu kategori tinggi. Banyak yang mengusulkan jaringan FKUB dibuat di tingkat lurah dan RW, tapi pemerintah hanya mengatur sampai tingkat kota. Adapun petikan wawancara singkat dengan Ahmad Suherman, sebagai berikut:

“Kerukunan umat beragama di kota Bandung ini Alhamdulillah terbilang cukup baik, bukan karena saya, apalagi ada pengurus yang bekerja baik. Sebagai ketua FKUB, harus baik-baik mengaturnya, karena ada yang agak keras, ada yang biasa-biasa, ada yang kelihatannya manut saja. Tentunya harus ada orang yang bisa mencairkan suasana. Sehingga, ketika sudah ada di FKUB kita semuanya saudara. Apabila ada masalah, kami membawanya pada rapat, dan diselesaikan dengan baik.”

Makna dari semua pernyataan di atas, adalah peran pimpinan dalam menjembatani (*bridge*) antar aktor dalam jaringan itu, dengan gaya bahasa yang bisa diterima berbagai pihak. Penerimaan yang baik dari berbagai pihak membuat sekat perbedaan agama dan paham (dalam intern Islam) bisa lentur. Intensitas komunikasi antar tokoh sudah semakin baik, sehingga peran FKUB tidak hanya terkait masalah antar agama namun juga terkait intern agama, misalnya masalah MTA dan aliran SalafiWahabi. Pihak Pemda pun semakin mengakui bahwa peran FKUB cukup strategis menjaga suasana kondusif di Bandung. Berikut petikan hasil wawancara peneliti dengan Asep Suherman:

”Pola komunikasi yang dibangun sangat diperlukan dalam menjaga harmoni. Misalnya dalam membahas salafi-wahabi, mereka dibekali pemahaman keagamaan yang berdekatan dengan salafi-wahabi, agar dapat mengurangi pertentangan antara kelompok Islam tradisional dengan modernis. Informasi yang disampaikan selalu disaring, agar tidak terjadi perdebatan yang tidak perlu.”

Pola komunikasi dengan informasi yang tersaring itu dianggap sebagai cara untuk mengeliminir terjadinya friksi antar tokoh. Dia menyadari bahwa ada resiko yang harus diterima dalam posisi sebagai penjaga gawang di organisasi tersebut, adanya kecurigaan dari sesama tokoh Islam merupakan sebuah konsekuensinya. Ada konsep yang sangat menarik dari beragam konsep yang dideskripsikan oleh tokoh-tokoh agama dalam FKUB. *Pertama*, adanya konsep ”menerima dan mengalah”. Konsep ini jika dipahami oleh para tokoh agama, secara efektif dapat mereduksi konflik. Jika dua nilai kearifan ini benar-benar dipakai oleh aktor dalam berinteraksi jaringan antartokoh agama, tidak ada konflik kepentingan antartokoh agama. Jika aktor merasa nrimo maka dia akan menahan keinginannya, tidak memaksakan kehendak. Demikian juga jika aktor itu mengalah atas proses pertukaran dengan pihak lain, maka tidak akan ada konflik dengan pihak lain. Di sini bukan berarti aktor tidak melakukan perjuangan atas kepentingannya, tetapi dia berusaha melakukan pertukaran dengan pilihan yang dianggap paling rasional.

Kaitannya dengan hal tersebut, Coleman (dalam Ritzer dan Goodman, 2005:394) mengatakan bahwa: “Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka”. Konsep-konsep lainnya yang penting untuk dikritisi adalah konsep mencari kesamaan dalam hidup beragama, yaitu *ahlaq*. Konsep ini sangat akan berlaku general karena baik atau buruknya perilaku individu tergantung akhlak-nya, sehingga apapun agamanya jika *ahlaq*-nya baik maka dia akan menyebarkan kebaikan pada sesama.

Hal ini di luar konteks apakah sebuah agama benar atau tidak benar, karena agama masih memiliki unsur lain yaitu *aqidah* dan *ibadah*. Jika akhlakna baik maka nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agamanya akan mudah diimplementasikan dalam perilakunya. Nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran kebaikan dari agama yang dianut individu akan saling melengkapi ketika diaplikasikan dalam hidup bermasyarakat Bandung yang semakin

berkembang menjadi masyarakat multikultur. Konsep-konsep perilaku baik dari kearifan lokal dan ajaran agama ketika dibawa oleh para tokoh agama dalam jaringan tokoh lintas agama secara perlahan akan melebur menjadi nilai-nilai yang dipakai bersama dan akan mempengaruhi pola struktur jaringan. Proses ini menurut Schultz (dalam Wirawan, 2012:147) disebut tipifikasi, yaitu proses individu mengkonstruksi makna di luar arus utama pengalamannya.

## **PENUTUP**

Pemerintah kota Bandung sangat terbantu dengan adanya FKUB kota Bandung dalam membangun harmoni antarumat beragama pada masyarakat yang mengalami perubahan komposisi umat beragamanya. Keberadaan jaringan antartokoh lintas agama, FKUB Bandung yang dibentuk dengan kebijakan top down, dapat dikatakan mampu menjadi jembatan komunikasi antartokoh agama, juga antara umat beragama dengan pemerintah. Peran anggota organisasi berperan sangat penting dalam membangun komunikasi antartokoh lintas agama di FKUB Bandung. Aktor tersebut mampu mengendalikan dan menyaring arus informasi, baik dalam intern organisasi FKUB maupun informasi yang masuk atau keluar dari FKUB. Peran aktor ini mampu mereduksi pesan-pesan yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak integrasi antartokoh agama. Aktor tersebut sekaligus berperan sebagai jembatan (bridge) komunikasi antartokoh agama dalam internal FKUB maupun dengan eksternal FKUB, dan ormas keagamaan di Bandung.

Organisasi antar-tokoh lintas agama sebagai jaringan komunikasi antarbudaya memerlukan individu atau aktor yang mampu berperan sebagai gate keeper dan bisa membangun jembatan komunikasi (bridge) dengan pihak-pihak terkait, termasuk jaringan tokoh lintas agama di luar FKUB. Komunikasi antartokoh lintas agama di Bandung banyak memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka telah membentuk sebuah keluarga. Rasa kekeluargaan antartokoh agama dalam FKUB telah terkonstruksi sebagai karakter kelompok, antara satu dengan lainnya merasa sebagai saudara. Kedekatan hubungan antar individu dalam FKUB mendorong tumbuhnya rasa saling percaya dan mereduksi kecurigaan antartokoh umat beragama. Hal tersebut ternyata mampu meningkatkan kapasitas modal sosial (social capital) dalam membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan kondusif. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial antarumat beragama.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku:**

- Abercrombie, dkk. 2010. Kamus Sosiologi. (edisi 5). Diterjemahkan oleh Desi Noviyani, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif (edisi kedua). Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Litbang dan Diklat. 2008. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Nothingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.
- Fitri, Wanda. 2009. Pluralisme Dan Kerukunan Hidup Beragama: Studi Komunikasi Antarbudaya Terhadap Hubungan Sosial
- Galtung, Johan., *Studi Perdamaian; Perdamaian, Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya, Pustaka Eureka, 2003.

- Janie Leatherman et.al., *Memutus Siklus Kekerasan; Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intranegara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004.
- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT Saadah Cipta Mandiri.
- Insani, Nur dan Waryanto, Nur Hadi. Penerapan Teori Graf Pada Analisis Jejaring Sosial Dengan Menggunakan Microsoft Nodexl. Dalam *PYTHAGORAS*, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, Volume 7 Nomor 1, Juni 2012, hal. 83 – 99.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2013. Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. Dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 21 Nomor 2, November 2013, hal. 393 – 416.
- Kartono, Kartini. 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Gramedia, 1984.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin dan Aris Ananta, *Penduduk Indonesia, Etnis, Agama dalam Era Perubahan Politik*, Jakarta, LP3ES, 2003.
- Liliweri, Alo., *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintasbudaya Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta, LKiS, 2005.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, London-New York, Routledge, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1988.
- Muhadjir, Noeng., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad, Afif., *Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Makalah Orasi Ilmiah, IAIN Sunan Gunung Djati, 1998.
- Muhammad, Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustakim. 2007. *Bandung Dalam Lintasan Lima Zaman: Kajian Sejarah, Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Pariela, Tonny D., *Damai di Tengah Konflik Maluku*, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, 2008.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi. 2009. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rafaele Pettazzoni, *Wujud Suprim; Struktur Fenomenologis dan Perkembangan Historis*, dalam, Ahmad Norma Permata, *Metodologi Studi Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Retnowati. 2013. Jaringan Sosial Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dengan Pondok Pesantren Di Malang Jawa Timur. Dalam *Jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang* Volume 20 Nomor 01 Tahun 2013 hal. 37 – 50.
- Ritzer, George., et.al., *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan)*. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rogers, Everett M and Lawrence D. Kincaid, 1981. *Communication Network Toward a New Paradigm for Research..* New York: The Free Press.
- Subagja, Rachmat., *Agama Asli di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1981.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar (cet.44)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tasmuji, Dkk., *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

- Travers, Max, *Qualitative Research Through Case Studies*, London:Sage Publications, 2001. Bandingkan dengan dengan konsepsi Neuman, Lawrence W (1994), *Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approachs*. Boston:Allyn and Bacon.
- Waileruny, Samuel.,*Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Wirawan, IB. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

**Makalah/Artikel:**

- Afif Muhaammad, *Teologi Kerukunan Umat Beragama*. IAIN Sunan Gunung Djati, 1998.
- Aripudin. A., *Akar Kekerasan*, Republika, 26 Nopember, 2010.

**Website:**

- Lintas Agama Di Sumatera Barat. Dalam prosiding Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-9. Surakarta, 2 – 5November 2009. Diperoleh dari <http://dualmode.kemenag.go.id/> diakses 13Pebruari 2014.
- Mengulik data suku di Indonesia. Dimuat dalam laman website BPJS yang diakses pada 05 September 2016, dari <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127>